

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 12

Pajak Masih Jadi Andalan PAD

SEMARANG - Pajak masih menjadi primadona pemerintah dalam komponen pendapatan asli daerah (PAD) di APBD Jateng. Pemerintah didorong melakukan inovasi agar menggali sumber-sumber pendapatan lain.

Besaran PAD menyumbang kontribusi 55,51% dari seluruh pendapatan daerah. Namun yang menjadi catatan, penerimaan pajak merupakan sumber utama penyumbang pendapatan terbesar, yakni 83,9% dari komponen PAD.

Sekretaris Daerah Pemprov Jateng Sri Puryono mengatakan pendapatan itu pun mesti terus digenjut dengan mengoptimalkan potensi yang ada.

“Untuk meningkatkan pendapatan di sektor lain, semua pihak terkait harus mendorong dan merumuskan langkah-langkah inovatif dan kreatif. Tujuannya menggali potensi-potensi pendapatan daerah guna meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Puryono, dalam Rakor Penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan TA 2019 dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan TA 2020, beberapa waktu lalu.

Untuk tahun 2019, PAD ditargetkan naik menjadi Rp 25,965 triliun atau meningkat 6,6% dari target 2018. Karena itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan PAD, di antaranya kecenderungan kehadiran kendaraan listrik yang belum masuk dalam

ketentuan dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Perlu strategi khusus untuk meningkatkan kepatuhan warga membayar pajak. Di samping itu, perlu titik-titik pelayanan bagi wajib pajak dalam membayar penalti, menggencarkan aplikasi Sakpole, serta terobosan baru dalam pembayaran pajak kendaraan melalui mini-market.

Dalam arahannya, ada tujuh hal penting yang berkaitan dengan pendapatan, di antaranya BPPD diminta memantau secara langsung perkembangan pendapatan seluruh SKPD/BLUD/BUMD.

Dalam menyusun target pendapatan SKPD/BLUD/BUMD harus bisa menjelaskan secara terukur dan dapat dicapai. Setiap SKPD diminta melaporkan pergerakan pendapatan secara real time yang teratur kepada BPPD.

Setiap SKPD/BLUD/BUMD harus bekerja keras merealisasikan pendapatan 2019 dan merencanakan pendapatan 2020 yang lebih prospektif dengan tingkat pertumbuhan minimal 20 persen lebih tinggi dibanding target pertumbuhan 2018.

“BLUD RSUD hendaknya semakin mandiri dalam pembiayaan operasional RS. Pembiayaan SDM agar menjadi kapitalisasi belanja rumah sakit yang harus diatasi dengan pendapatan operasional rumah sakit,” tandasnya. (H81-41)